

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah program pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disepakati negara-negara anggota pada 2015. Adanya kemiskinan ekstrem di beberapa negara menjadi penyebab dasar dari program tersebut dan dengan membuat sebuah pertemuan pada September 2000 yang diikuti oleh 189 Negara dengan menyetujui deklarasi yang di kenal dengan sebutan *The Milenium Development Goals* (MDGS) yang kemudian berlanjut menjadi SDGs. SDGs mencerminkan prinsip moral bahwa tidak ada negara yang boleh tertinggal dalam kemajuan lainnya; Setiap individu dan setiap negara bertanggung jawab memainkan perannya dalam transmisi visi global SDGs yang dilandasi oleh 3 pilar dalam implementasinya, yaitu :

- 1) Pilar sosial, Pembangunan manusia dalam bidang sosial, Dalam ruang lingkup sosial, pembangunan manusia melalui pilar sosial ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Pilar ini juga melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sekto swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwasemua aspek sosial tersebutdiperhatikan dan dikembangkan secara holistik.
- 2) Pilar Ekonomi, Pembangunan Ekonomi, yang di maksud dengan Pilar ekonomi dalam pembangunan ekonomi merujuk pada faktor-faktor dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produksi, distribusi, dankonsumsi barang dan jasa.
- 3) Pilar Lingkungan, Termasuk Keanekaragaman Hayati, **Kelestarian lingkungan** adalah kemampuan untuk melestarikan dan melindungi lingkungan alam dari waktu ke waktu melalui praktik dan kebijakan yang tepat, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan ketersediaan sumber daya di masa depan.

SDGs adalah sebuah agenda pembangunan skala global yang berkelanjutan demi masyarakat yang sejahtera dan damai. Hal ini sebagai wujud dari kepedulian bersama untuk membangun visi global bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah kewajiban bagi seluruh negara di dunia. Tujuan pertama yang ingin diselesaikan dan ditekankan oleh SDGs adalah “*No Poverty* (menghilangkan kemiskinan),” Target dan tujuan SDGs selanjutnya

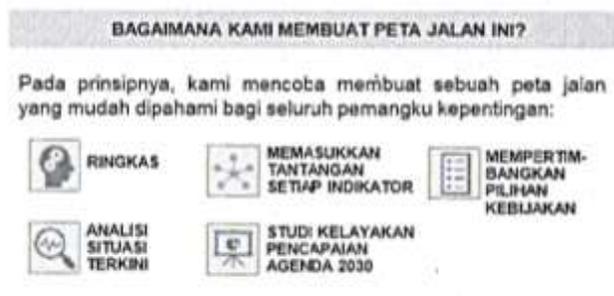
dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar Negara, memperbaiki manajemen air dan strategi, dan mengambil langkah penting untuk mengatasi perubahan iklim.

SDGs (Sustainable Development Goals) adalah agenda global untuk pembangunan berkelanjutan demi masyarakat yang sejahtera dan damai. Tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan, dengan fokus pada pemberantasan kemiskinan, kelaparan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan pengelolaan air dan strategi untuk mengatasi perubahan iklim.

SDGs merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah saja. Selain itu, karena tujuan dan target SDG mencakup isu-isu lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, dan kemitraan, maka tidak ada formula tunggal untuk mencapainya. Terutama di Indonesia yang memiliki 1.340 suku dengan budaya, bahasa, dan kepercayaan yang berbeda-beda memerlukan pendekatan multidisiplin yang juga melibatkan berbagai aktor dari pemerintah, akademisi, LSM, sektor swasta, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai SDGs. Untuk melacak sejauh mana posisi Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs, diperlukan indikator yang terukur untuk melacak kemajuan Indonesia dalam SDGs. Sebanyak 94 dan 241 indikator SDG global yang nyata sejalan dengan tujuan RPJMN. Oleh karena itu, untuk memahami kemajuan indikator SDG yang diproyeksikan, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki peta jalan yang menjadi pedoman perencanaan dan sasaran program kegiatan agar sejalan dengan pencapaian SDGs.

Berikut adalah peta jalan yang telah di buat oleh pemerintah pusat :

Gambar 1.1 Peta Jalan Kebijakan SDGS Indonesia



Sumber : Bappenas (Peta Jalan Kebijakan SDGS Indonesia Menuju 2030)

Peta jalan ini memuat kondisi terkini dan proyeksi skenario untuk beberapa indikator, diikuti dengan panduan kebijakan untuk setiap indikator dari setiap tujuan. Bagian selanjutnya berfokus pada keterkaitan antara SDGs dan kebutuhan pendanaan untuk SDGs. Dalam menulis sebuah cerita terlebih dahulu dilakukan kajian teori sehubungan dengan indikator yang diharapkan. Kemudian belajar secara empiris, membuat perbandingan antar negara atau wilayah. Terakhir, perkirakan berapa jumlahnya proyek dan perhitungan ini dapat dilakukan hingga tahun 2030. Karena peta jalan berfokus pada tujuan dan sasaran paling penting dari tantangan pembangunan di Indonesia, maka pertanyaan utama dalam peta jalan direduksi menjadi isu-isu yang terkait dengan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pangan, keamanan dan pertanian berkelanjutan, infrastruktur termasuk infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi, telekomunikasi dan energi hijau jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati (Keanekaragaman Hayati), serta pendanaan administrasi publik.

Indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan perkotaan dan perdesaan yang patut mendapat perhatian. Untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan membuka lapangan kerja, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Proses pembangunan memiliki banyak tujuan, termasuk berbagai perubahan aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Pembangunan ekonomi sebagai proses multidimensi mencakup perubahan struktur, sikap terhadap kehidupan dan institusi, serta pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

Disadari atau tidak, kemiskinan dan kekayaan seringkali hidup berdampingan di suatu wilayah, bahkan di negara yang makmur sekalipun, Anda dapat mengukur kemiskinan dengan melihat perbandingannya. antara pendapatan rumah tangga dan pengeluaran konsumsi sehari-hari. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup yang paling

mendasar dan kemiskinan merupakan permasalahan global karena kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan ekonomi. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan secara optimal, perluasan angkatan kerja dan peningkatan taraf hidup penduduk, untuk mencapai tujuan. Pembangunan secara keseluruhan memerlukan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Permasalahan rendahnya taraf hidup ini berkaitan dengan rendahnya pendapatan, perumahan yang tidak memadai, buruknya pelayanan kesehatan dan kesehatan serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga mengakibatkan buruknya sumber daya manusia dan tingginya tingkat pengangguran.

Todaro dan Smith (2006:75) menyatakan bahwa: kemiskinan ketidakmungkinan memperoleh standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Kemiskinan merupakan salah satu ukuran penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Secara umum, tingkat kemiskinan di 4 wilayah digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut.

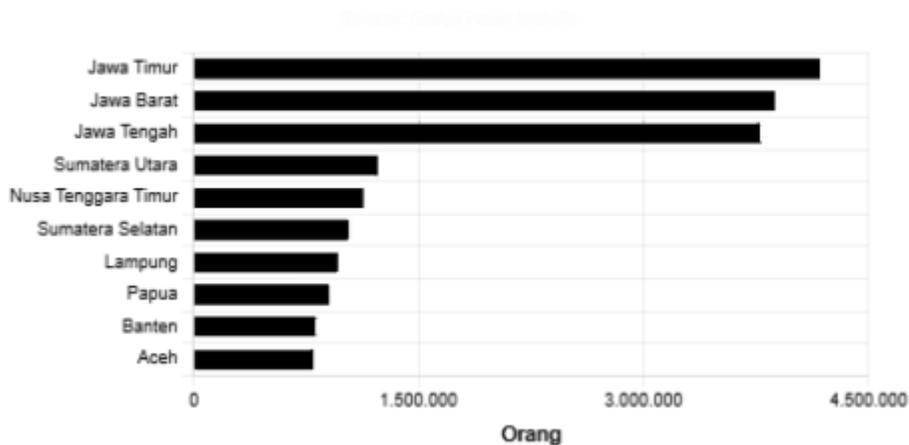
Di negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan pendapatan rendah dan kemiskinan merupakan permasalahan utama pembangunan ekonomi. Tujuan dilaksanakannya pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang tujuan pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan. Peraturan Presiden ini merupakan komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan/SDGs untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam mencapai pembangunan global sebagaimana tertuang dalam SDGs. Secara umum, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan pendapatan rendah dan kemiskinan merupakan permasalahan utama pembangunan ekonomi. Tujuan dilaksanakannya pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

melalui pembangunan. Perekonomian merespons berbagai masalah pembangunan dan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan.

Salah satu ciri kemiskinan di Indonesia adalah tingginya disparitas Ukuran pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan daerah pedesaan mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada Maret 2023 Jawa Barat menjadi provinsi nomor dua dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Tercatat tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7,38% (11,16 juta orang), adapun di pedesaan tercatat hampir dua kali lipat yaitu sebesar 12,82% (15,26 juta orang). Angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan data di tahun 2019, di mana untuk wilayah perkotaan sebesar 6,56% dan pedesaan sebesar 12,60% (Badan Pusat Statistik, 2023).

Gambar 1.2 jumlah penduduk miskin terbanyak di indonesia

Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak di Indonesia (Maret 2023)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada di pedesaan, pemerintah Indonesia menerbitkan program Sustainable Development Goals desa (SDGs desa) pada tahun 2020. Bagi desa-desa di Indonesia, sangat diperlukan adanya penerjemahan SDGs ke dalam SDGs desa. Faktanya, SDGs merupakan acuan utama pembangunan jangka menengah negara-negara di seluruh Indonesia. SDGs yang teruji mempermudah pengukuran pembangunan. Langkah itu sendiri mencakup aspek kehidupan warga dan lingkungannya.

Adapun latar belakang kehadiran SDGs desa adalah:

- (1) Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah; dan
- (2) Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang lebih terfokus.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, secara otomatis seluruh provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib untuk mengeksekusi Peraturan Presiden nomor 59 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan agar kesenjangan yang terjadi antara setiap provinsi, perkotaan dan pedesaan. yang didalamnya juga terdapat kebijakan yaitu program BLT-Dana Desa, Rutilahu dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Blt-dd adalah program pemerintah yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang tinggal di desa. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama di masa pandemic, rutilahu adalah Rumah Tidak Layak Huni merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimal luas bangunan dan akses sanitasi. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan ini dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat desa, serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Program pemberdayaan masyarakat kegiatannya Program pemberdayaan masyarakat desa dapat berupa: Pengembangan ekonomi desa, seperti agrowisata, UMKM, dan ekonomi kreatif Peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan dan pendampingan Pemberdayaan kelembagaan desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi Pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan irigasi Pemberian dana atau pinjaman dengan bunga rendah untuk memulai atau mengembangkan usaha Peningkatan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan Mendorong kerja sama antar desa. Tujuan dari ketiga program kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi kemiskinan hingga seminimal mungkin dan memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia merasakan kesejahteraan. SDGs Desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan negara tanpa kemiskinan dan kelaparan, negara dengan pertumbuhan ekonomi seragam, negara sadar kesehatan, negara sadar lingkungan, negara sadar pendidikan, negara ramah perempuan, berjejaring dan berbudaya. negara-negara yang bertanggung jawab untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam SDGs Desa, terdapat delapan tipe desa yang berfungsi sebagai

arah pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Adapun kedelapan tipe desa adalah sebagai berikut :

- (1) Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan, adalah pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi dimana di sebuah desa, tidak ada penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan atau kelaparan Dengan menerapkan adanya program ini secara berkelanjutan, diharapkan desa agar dapat mencapai kondisi di mana semua penduduknya dapat hidup dengan layak tanpa harus mengalami kemiskinan atau kelaparan.
- (2) Desa Ekonomi Tumbuh Merata, yang di maksud desa ekonomi tumbuh merata adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah desa, sehingga tidak hanya beberapa bagian dari desa yang mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya tersebar secara adil di antara semua penduduk desa.
- (3) Desa Peduli Kesehatan, desa peduli kesehatan adalah menempatkan kesehatan sebagai fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan diharapkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat desa dapat ditingkatkan secara signifikan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas hidup dan produktivitas ekonomi mereka.
- (4) Desa Peduli Lingkungan, adalah untuk melestarian lingkungan alam dan sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa juga agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari bagi penduduknya saat ini ataupun untuk generasi mendatang
- (5) Desa Peduli Pendidikan, adalah termasuk menekankan pentingnya pendidikan sebagai pondasi bagi pembangunan masyarakat desa. Dengan menerapkan desa peduli pendidikan ini diharapkan agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang berpendidikan dan berdaya saing di era global.
- (6) Desa Ramah Perempuan, adalah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan di sebuah desa yang mendukung kesetaraan gender, keselamatan, dan kesejahteraan perempuan juga dapat menjadi tempat di mana perempuan merasa aman, dihargai, mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bernegara. Hal ini tidak hanya menguntungkan perempuan secara langsung, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh masyarakat desa dalam jangka panjang.
- (7) Desa Berjejaring, adalah dimana desa terhubung melalui jaringan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya, dan dukungan antara desa-desa yang terlibat. Melalui jejaring ini, desa-desa dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, berkolaborasi dalam

proyek-proyek pembangunan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

- (8) Desa Tanggap Budaya, sebuah konsep yang mengacu pada upaya untuk mempertahankan, mempromosikan, dan mengembangkan warisan budaya mereka dengan cara yang responsif terhadap perubahan zaman dan tantangan kontemporer. Hal ini melibatkan berbagai aktivitas, seperti melestarikan tradisi lokal, mendorong kreasi seni dan budaya baru yang terinspirasi oleh tradisi tersebut, serta membangun kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Desa Tanggap Budaya juga dapat mencakup inisiatif-inisiatif untuk memasarkan produk-produk budaya lokal, membangun pariwisata berbasis budaya, dan memperkuat konektivitas antara komunitas lokal dan global. Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang tidak luput dari persoalan kemiskinan di Indonesia. Wilayah Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota . Dengan jumlah kabupaten dan kota yang banyak, maka persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat tidak bisa dianggap sepele termasuk juga dengan Kabupaten Bekasi. (Siswanto, 2021)

SDGs Desa pada Nomor 1 Desa Tanpa Kemiskinan. SDGs Desa nomor 1 yaitu desa tanpa kemiskinan menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 0% pada tahun 2030. Artinya tidak boleh ada penduduk miskin di desa. Berdasarkan RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi berupa rendahnya pendapatan, namun juga erat kaitannya dengan persoalan lain diantaranya: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Sehingga kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mencapai target desa tanpa kemiskinan diperlukan kebijakan yang terintegrasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, seperti, meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Adapun sasaran untuk mencapai target 0% kemiskinan di desa pada tahun 2030 diantaranya, sebanyak 100% masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan; penyandang disabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen

menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; cakupan pelayanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi baik 40 persen penduduk berpenghasilan terendah; akses dan layanan pendidikan; hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya. Dalam SDGS desa pada poin 1 adanya beberapa rancangan arah kebijakan pada tahun 2020 – 2030, arah kebijakan tersebut adalah :

1.1.1 Arah kebijakan di tahun 2020 – 2024

1. Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas

- Pemantapan jaminan sosial yang komprehensif dan memadai bagi penduduk miskin dan rentan.
- Integrasi bantuan dan subsidi tepat sasaran yang mendorong peningkatan keuangan inklusif.
- Pengembangan kualitas layanan dasar, melalui tata kelola SPM yang handal dan responsif.

2. Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis

- Penguatan Tim Koordinasi Daerah untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pencapaian SDGs.
- Pemantapan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) yang terhubung dengan basis data kependudukan dan JKN
- Pengembangan sistem data dan layanan satu pintu untuk sinergi program-program pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan kapasitas Pemda dalam analisis, perencanaan dan penganggaran untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

- Mendorong kolaborasi peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan mentoring.
- Peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan (perhitungan sosial dan Reforma Agraria).
- Pemanfaatan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mengembangkan nilai tambah usaha produktif masyarakat.
- Pengembangan usaha sosial rintisan (social entrepreneurs) untuk mengentaskan permasalahan sosial masyarakat

1.1.2 Arah Kebijakan Untuk Tahun 2025 – 2030

1. Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas
 - Pemantapan bantuan sosial yang terintegrasi dengan keuangan inklusif, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.
 - Pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam layanan dasar di seluruh pelosok Indonesia.
 - Sinergi dan kerjasama pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, LSM) dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar
2. Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis
 - Mendorong inovasi Pemerintah Daerah dalam percepatan pengurangan kemiskinan.
 - Pengembangan strategi replikasi di daerah-daerah sulit untuk mendorong pengurangan kemiskinan.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan
 - Peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan menengah melalui berbagai pelatihan, pendampingan memulai usaha, dan mentoring.
 - Menjamin permodalan dan pasar bagi usaha ekonomi lokal.
 - Pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat.
 - Menciptakan iklim usaha yang harmonis dengan didukung kebijakan yang adil dan merata.

Dengan adanya arah kebijakan tersebut , di harapkan akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di indonesia.

Seperti yang kita ketahui data terakhir BPS pada gambar 1.2 tahun 2023 bahwa jumlah penduduk di indonesia pada pedesaan ini berjumlah sekitar 15,26 juta orang, salah satu wilayah pedesaan indonesia yang mengalami kemiskinan adalah Kabupaten Bekasi bisa dilihat dari data Bappeda Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 di bawah ini :

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020- 2023

Tahun	Jumlah Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Bekasi
2020	4,82%
2021	5,21%
2022	5,01%
2023	4,93%

Sumber: Bappeda Kabupaten Bekasi tahun 2023

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada tabel 1.1 tahun 2021 tercatat sebesar 5,21% masyarakat kabupaten bekasi berada dalam kategori miskin. Jika dibandingkan dengan data tahun 2023 adanya penurunan sebanyak 0,08 persen. Walaupun mengalami penurunan Dalam hal ini, beberapa daerah di Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dari sisi jumlah maupun presentasinya. Keadaan demografis, jumlah penduduk, hingga kebijakan daerah masing-masing dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut yang salah satunya adalah Kabupaten Bekasi.

Dalam penerapannya, SDGs bertujuan untuk mengumpulkan data warga, aparat desa (desa), dan perkumpulan warga (RW). Tujuannya untuk mendapatkan gambaran konkrit permasalahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi. Tentu saja ada program bantuan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi berupa Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). bersikap objektif yang seperti stimulus. bagi sebagian warga desa Srijaya yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin.

Salah satu wilayah Kecamatan di Kabupaten Bekasi adalah Kecamatan Tambun Utara yang memiliki potensi besar pada kemiskinan di salah satu desanya adalah Desa Srijaya. Secara administratif, saat ini desa srijaya memiliki 3 dusun, 6 RW dan 30 RT yang terbagi menjadi dusun I, dusun II, dan dusun III. Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Merupakan Salah Satu Wilayah Yang Termasuk Dalam Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduknya sekitar 8.569 jiwa. luas wilayah desa srijaya sebesar 408.945 Ha. Berdasarkan data BPS (Kecamatan Tambun Utara Dalam Angka 2024) kemiskinan di Desa Srijaya sebanyak 5,28 % dengan kepadatan penduduk sebesar 2.504,66 juta orang.

Dari data monografi Desa Srijaya pekerjaan masyarakat Desa Srijaya mayoritas sebagai buruh harian lepas dan buruh tani hal tersebut menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di desa srijaya karena penghasilan yang masih dibawah rata-rata, selain pekerjaan ada juga beberapa faktor lain seperti tingkat pendidikan yang masih rendah, rata-rata pendidikan di desa srijaya yang tidak tamat sd sebanyak 875 orang (sumber data monografi desa 2024).

Secara umum masyarakat Desa Srijaya merasakan komitmen, tanggung jawab dan keseriusan kehadiran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Meskipun masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam arah pengentasan kemiskinan, namun angka kemiskinan belum mengalami penurunan yang signifikan, Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa Srijaya harus membuat strategi baru untuk mengurangi kemiskinan di desa Srijaya. Program pengentasan kemiskinan yang selama ini tidak melibatkan masyarakat secara aktif justru membuat program pengentasan kemiskinan yang bersifat administratif kurang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan (Achmad Fatony, 2011). Koordinasi yang baik antara pusat dan daerah tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dan berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Tanggung jawab penyelesaian masalah kemiskinan tidak hanya berada pada pemerintah pusat atau daerah saja. Masyarakat juga wajib berpartisipasi dalam program pemberdayaan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan SDGs dalam upaya penanganan kemiskinan masyarakat di Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Jawa Barat dalam menyusun program SDGs untuk pengentasan kemiskinan;

1.4 Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademik

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengetahui bagaimana kebijakan SDG Desa Srijaya ditransmisikan pada masyarakat Desa Srijaya. Dalam penelitian ini, peneliti tentu saja mengkaji berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam konteks kebijakan SDG. , baik dalam CV maupun ulasan, dan merupakan sumber yang benar-benar berguna dalam proses penelitian ini.

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang telah dilakukan, maka diajukan permasalahan mengenai “kebijakan Sustainable Development Goals dalam upaya penanganan masyarakat miskin di Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi ” ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut :

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode penelitian	hasil
1	2	3	4	5
1.	Markus Patiung (2019)	Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan Sdgs Kabupaten Mojokerto	Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini berupa penentuan arah kebijakan selama 5 tahun dan pelaksanaan pemantauan/evaluasi pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto, kebijakan tersebut antara lain: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penguatan perekonomian masyarakat untuk menciptakan Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan bermartabat

1	2	3	4	5
2.	Ayu Oktaviani Musri(2020)	Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengurang Kemiskinan	Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program SDGs dengan tujuan pengentasan kemiskinan memusatkan kepada program-program PKH, PIP, PIS dan BPNT.
3.	Slam Faruk Zaini (2021)	Kebijakan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa	Metode penelitian Yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa arah pembangunan dan penggunaan dana desa yang masih belum berpihak kepada program pengentasan kemiskinan di wilayah Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4.	Azizatul Ula (2021)	Visi Sustainable Development Goals (Sdgs) Terhadap Kebijakan Diversifikasi Pangan Lokal Dalam Mengatasi Kelaparan	Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan adalah literature review	Hasilnya adalah bahwa beberapa pangan lokal untuk diteliti yaitu sagu, jagung, dan singkong. Pangan lokal tersebut, dapat memenuhi ketahanan pangan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kebijakan diversifikasi pangan lokal merupakan kebijakan yang tepat untuk dilakukan agar dapat menjaga ketahanan pangan di Indonesia

1	2	3	4	5
5.	Sri Endang Rahayu1, Prawidya Hariani RS2 & Elizar Sinambela3 (2022)	Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Untuk Mensejahterakan Masyarakat Tanpa Kemiskinan di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dengan adanya Program BLT-Dana Desa mampu membantu pemerintah dalam penanganan kemiskinan penduduk.
6.	Ghulam Zakiyyan Dzulqarnain1);Dine Meigawati2); Yana Fajar Basori 3) (2022)	Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi	Metode penelitian yang digunakan dalam rencana penelitian iniyaitu, metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam bukunya yang berjudul Research Design (2016:4-5) Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok tertentu untuk masalah sosial atau kemanusiaan.	Implementasi SDGs di Kota Sukabumi terkendala pemahaman yang kurang mendalam, komunikasi yang belum optimal, serta SDM dan kondisi eksternal yang belum mendukung sepenuhnya. Karakteristik agen pelaksana dan sikap mereka juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Perbaikan pada aspek-aspek ini diperlukan untuk mencapai tujuan SDGs secara efektif.

1	2	3	4	5
7.	Aan Zulyanto (2022)	Pendidikan Dan Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)	Tulisan ini bersifat deskriptif dimana tujuan penelitian adalah memberikan gambaran bagaimana pendidikan dan belanja fungsi pendidikan dapat mengentaskan kemiskinan sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Metode yang digunakan adalah dokumentasi dengan sumber informasi berasal dari artikel-artikel penelitian terdahulu.	kebijakan pemerintah secara substansi akan mengurangi kemiskinan, oleh karena itu maka pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang harus pro poor. Investasi dalam pendidikan merupakan salah satu program pemerintah yang berkebijakan pro poor untuk meningkatkan modal manusia atau kualitas manusia yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.
8.	Aldo Muhamad Rifa, Cucu Sugiarti, Lina Aryani (2023)	Manajemen Strategi Dalam Pencegahan Stunting Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi)	metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif ini dilandaskan karena peneliti ingin meneliti secara detail dan mendalam	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai strategi yang dijalankan bersama dengan dinas yang lain. Strateginya dengan menjalankan kegiatan “8 Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting”.

1	2	3	4	5
9.	Puspa Indah Danilia, Mugi Setianingsih (2023)	Implementasi Sdgs Terhadap Pengentasan Kemiskinan	Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teori dan referensi lain yang terkait dengan pengentasan kemiskinan	Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa isu pengentasan kemiskinan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk turut menurunkan angka kemiskinan.
10.	Tantyo Nandi Purwoko (2023)	Implementasi Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung	Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. H	Hasil penelitian Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan menunjukkan bahwa : 1) Standar dan tujuan kebijakan sudah berhasil menerapkan nilai implementasi. 2) Sumber daya kurang berhasil menerapkan nilai implementasi. 3) Disposisi atau sikap para pelaksana cukup berhasil menerapkan nilai implementasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di terdahulu yaitu jika penelitian yang diteliti oleh markus paitung Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan Sdgs Kabupaten Mojokerto, dengan hasil penelitian ini berupa penentuan arah kebijakan selama 5 tahun dan pelaksanaan pemantauan/evaluasi pembangunan SDGs Kabupaten

Mojokerto, kebijakan tersebut antara lain: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penguatan perekonomian masyarakat untuk menciptakan Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan bermartabat. Sedangkan penelitian ini berjudul kebijakan sustainable development goals dalam upaya penenganan kemiskinan di Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui strategi pemerintah Desa Srijaya dalam penanganan kemiskinan di Desa Srijaya. Novelty penelitian ini adalah adanya keterbaruan penelitian di Desa Srijaya dengan fokus pada strategi pemerintah Desa Srijaya dalam penanganan kemiskinan di Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi tolok ukur betapa pentingnya Kebijakan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Upaya Penanganan Kemiskinan Masyarakat Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam bermasyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dalam Proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang kondisi-kondisi umum yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, kemudian setelahnya dapat ditarik rumusan masalah untuk menjadi bahan pertanyaan mendasar dari penelitian. Kemudian akan dijabarkan menjadi beberapa tujuan penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan pembahasan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan terkait dengan tema yang diteliti.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian, Teknik Perolehan Data, Tempat Dan Waktu Penelitian, Jadwal Peneliti

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bab empat ini, berisikan tentang hasil penelitian. Jadi apa yang diperoleh di lapangan, maka itulah yang dilaporkan. Di sini pulalah, peneliti membahas sedetail dan sejelas mungkin.

BAB V : PENUTUP

Dibagian akhir adalah kesimpulan. Yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengambilan data secara menyeluruh serta diberikan saran – saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang judul-judul jurnal, buku, alamat website dan produk hukum yang menjadi referensi untuk penulis.